



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya penyesuaian terhadap proyeksi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 25) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu proses pembangunan yang turut menentukan keberhasilan pembangunan adalah perencanaan. Urgensitas perencanaan pembangunan sebagai upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan berfungsi untuk memastikan sumber daya yang akan dipergunakan tersedia dan mampu dioptimalisasikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi. Dinamika pembangunan dalam tahun berjalan juga diiringi dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan disamping keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Perubahan

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Perubahan RKPD Sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2015, serta kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Maksud dan Tujuan

- (a) Maksud dari perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah:

Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

- (b) Tujuan dari perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 meliputi upaya

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan serta kedaulatan energi;

3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
4. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2015 masih menghadapi tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik dan

Bahan Bakar Minyak. Selain itu, kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global akibat tekanan nilai dolar US\$ terhadap Rupiah turut mempengaruhi kondisi perekonomian Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan Kebijakan umum pembangunan disesuaikan dengan beberapa indikator makro perekonomian antara lain :

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama tahun 2010 – 2014 nilai PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan positif, hal tersebut terlihat pada nilai PDRB tahun 2010 Atas Harga Dasar Berlaku (ADHB) sebesar Rp.444,692 Trilyun, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp.700,071 Trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2010 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.186,995 Trilyun, meningkat menjadi Rp.235,298 Trilyun pada tahun 2014.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 2010 – 2013 bergerak naik secara positif berturut-turut diangka 5,84%, 6,01% dan 6,34%, namun pada kurun waktu tahun 2013 – 2014 melambat secara berturut-turut dari 5,81% menjadi 5,47%. Meskipun demikian, pada tahun 2014 seluruh sektor ekonomi pembentuk PDRB naik secara positif dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan dengan angka tertinggi terjadi pada sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan yang mencapai 8,76% dan terendah pada sektor pertanian sebesar -1,11%.

c. Inflasi

Angka inflasi di Jawa Tengah pada Bulan Desember 2014 sebesar 8,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 (7,99%). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama bensin, tarif listrik, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, cabai rawit, kontrak rumah, angkutan dalam kota, serta akademi/perguruan tinggi. Laju inflasi bulan Mei Tahun 2015 sebesar 6,28% (yoy). Inflasi bulan Mei Tahun 2015 antara lain disebabkan kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah pada 28 Maret 2015, elpiji dan

penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk beberapa golongan per 1 Mei 2015 yang ditengarai akan berdampak pada peningkatan biaya produksi oleh perusahaan, sehingga akan meningkatkan harga jual di pasaran. Adapun komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan bawang putih. Tahun 2015 inflasi diperkirakan berada pada kisaran $4,5 \pm 1\%$ (prediksi Bank Indonesia $4 \pm 1\%$). Perkiraan Inflasi Tahun 2015 tersebut didukung oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis. Selain itu, semakin solidnya koordinasi antara Pemerintah dan BI dalam forum TPID turut mendukung terjaganya inflasi Jawa Tengah. Namun demikian, anomali kondisi cuaca yang mempengaruhi musim tanam dan juga musim panen perlu untuk diwaspadai termasuk bencana alam lainnya seperti banjir ataupun badai yang dapat menimbulkan gejolak harga pangan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 0,996 juta orang (5,68%) menurun dibandingkan Tahun 2013 sebesar 1,02 juta orang (6,02%). Bulan Februari Tahun 2015, jumlah pengangguran sebesar 0,97 juta orang (5,31%). Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah diikuti sektor perdagangan, industri dan jasa. Tahun 2015 tingkat pengangguran Jawa Tengah ditargetkan dapat diturunkan menjadi 4,93 – 4,62%.

e. Kemiskinan

Penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2014 sebanyak 4,561 juta jiwa (13,58%), mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2013 sebesar 4,704 juta jiwa (14,44%). Domisili penduduk miskin sebagian besar berada di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2014 penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,790 juta jiwa (15,35%) sedangkan di perkotaan sebanyak 1,771 juta jiwa (11,50%). Kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2015 ditargetkan dapat diturunkan menjadi 9,05 – 8,75%.

f. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP di Jawa Tengah Tahun 2014 mencapai sebesar 100,55. Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2015 NTP mencapai 97,93

meningkat dibandingkan capaian Bulan April Tahun 2015 sebesar 97,84. Sub sektor yang mengalami kenaikan indeks yaitu hortikultura naik 0,84% dan sub Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,52%. Target NTP sampai dengan akhir Tahun 2015 sebesar 102,36.

Secara umum pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2013-2014 serta target Tahun 2014 dan Prediksi Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2014,
Target Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016 - 2017

No	Indikator	2013	2014	2015*)	2016**)	2017**)
1.	PDRB :					
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	623,500	700,071***)	638,219***)	741,222***)	780,379***)
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	223,095	235,298***)	228,599***)	248,114***)	256,453***)
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	5,47	6,0 - 6,5	6,1 – 6,6****)	6,2 – 6,7
3.	Inflasi (%)	7,99	8,22	5 ± 1	4,5 ± 1****)	4,5 ± 1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)	6,34	6,71	7,44	7,75	8,07
5.	Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)	114,401	105,8	124,88	130,48	136,31
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,02	5,68	4,93 – 4,62	4,66 – 4,43	4,49 – 4,27
7.	Kemiskinan (%)	14,44	13,58	9,05 – 8,75	8,60 – 8,35	8,25 – 8,00
8.	NTP	108,67	100,55	102,36	102,63	102,86

Sumber : BRS Jawa Tengah, 2015; RPJMD Prov. Jateng 2013-2018

Keterangan : *) Target RKPD Tahun 2015

**) Target RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013 – 2018

***) Tahun Dasar 2000

****) Berdasarkan BI, prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,7-6,1 persen

*****) Berdasarkan BI, prediksi inflasi tahun 2016 sebesar 4±1 persen

2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, diperkirakan sejumlah Rp.17,726 trilyun, melebihi sejumlah Rp.628,33 milyar atau 3,67% dari Pendapatan

Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.17,097 trilyun. Pendapatan tersebut diasumsikan berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah turun sejumlah Rp.100,47 milyar atau 0,86% sehingga menjadi Rp. 11,596 trilyun antara lain Pajak Daerah turun sejumlah Rp.203,76 milyar atau 1,98% sehingga menjadi Rp.10,062 trilyun, Retribusi Daerah naik sejumlah Rp.3,95 milyar atau 4,71% sehingga menjadi Rp.87,97milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sejumlah Rp.860,09 juta atau 0,27% sehingga menjadi Rp.320,04 milyar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah naik sejumlah Rp.98,47 milyar atau 9,58% sehingga menjadi Rp.1,126 trilyun.
2. Dana Perimbangan turun sejumlah Rp.241,20 milyar atau 8,95% menjadi Rp.2,453 trilyun dari bagi hasil pajak/bukan pajak turun sejumlah Rp.66,70 milyar atau 8,01% menjadi Rp.765,77 milyar, DAU turun sejumlah Rp.174,50 milyar atau 9,67% menjadi Rp.1,629 trilyun dan DAK dianggarkan tetap yaitu sebesar Rp. 57,97 milyar.
3. Lain-lain pendapatan daerah naik sejumlah Rp.970,16 milyar atau 35,84% menjadi Rp.3,676 trilyun dari Dana Hibah naik sejumlah Rp.4,57 milyar atau 15,30% menjadi Rp.34,46 milyar, dan dari Dana Penyesuaian naik sejumlah Rp.965,44 milyar atau 36,07% sehingga menjadi Rp. 3,642 trilyun.
4. Hal-hal yang mempengaruhi dalam perencanaan pendapatan pada Perubahan APBD TA. 2015 adalah adanya penerimaan :
 - a. Penurunan Penerimaan dari BBNKB antara lain disebabkan : Kementrian Dalam Negeri RI no 101 tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015, mengamanatkan : pemberian subsidi kepada angkutan umum orang, sebesar 70% dan angkutan umum barang sebesar 50% sehingga mengurangi potensi Pajak Daerah dari BBNKB kurang lebih Rp. 200 milyar, Penjualan Obyek Kendaraan Januari s/d Maret 2015 menurun sekitar 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2014.
 - b. Kenaikan dari penerimaan Retribusi Daerah bersumber dari kenaikan tarif Retribusi Daerah diberapaka SKPD;

- c. Penurunan dari Dana Perimbangan, dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAU merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai target yang telah direncanakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, melalui:

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
2. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
4. Peningkatan dana perimbangan dari bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
6. Mengakomodir penerimaan pajak rokok berdasarkan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah Provinsi.

3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Proyeksi total belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2015, diperkirakan sejumlah Rp. 19,174 Trilyun naik sejumlah Rp. 1,837 Trilyun atau 10,60% dari Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 17,337 Trilyun. Kenaikan tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung naik sejumlah Rp. 1,451 Trilyun atau 12,44% menjadi sejumlah Rp. 13,116 Trilyun dan Belanja Langsung naik sejumlah Rp. 386,04 Milyar atau 6,81% menjadi sejumlah Rp. 6,058 Trilyun. Perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2015 meliputi asumsi Belanja Tidak Langsung dan asumsi Belanja Langsung dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Asumsi Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan:

- 1) Asumsi perubahan dalam penyusunan Belanja Pegawai yang disebabkan:

- a. Penyesuaian Gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tunjangan Beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 dengan perincian realisasi bulan Januari s/d Mei 2015 ditambah dengan data jiwa bulan Mei 2015 kali 7 bulan, adanya mutasi/tambahan pegawai, dan ditambah acress 2,5% serta rapel yang belum dibayarkan bulan Januari-Desember 2013;
 - c. Penyesuaian Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - d. Insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tatacara pemberian insentif sebagai kewajiban atas kenaikan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - e. Rencana penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Tambahan Belanja Hibah;
 - 3) Tambahan Belanja Bantuan Sosial guna peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - 4) Tambahan Belanja Bagi Hasil Pajak;
 - 5) Tambahan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

b. Asumsi Belanja Langsung

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dalam Belanja Langsung, pelaksanaannya diutamakan untuk mendorong capaian target sasaran RPJMD Tahun 2013-2018 dan upaya

9 ✓

percepatan pencapaian target MDG's Tahun 2015 sekaligus berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional.

Berdasarkan penjabaran kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka program/kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) Mendorong capaian target sasaran RPJMD Tahun 2008-2013 yang belum tercapai;
- 2) Upaya percepatan pencapaian target MDG's Tahun 2015;
- 3) Kontribusi terhadap pencapaian target sasaran pembangunan dan komitmen nasional;
- 4) Upaya peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;
- 5) Fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Konsisten dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 7) Melakukan pergeseran anggaran yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan PPKD;
- 8) Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kendala pada anggaran induk baik berupa optimalisasi dana maupun penyesuaian sasaran dan lokasi kegiatan;
- 9) Mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan.

c. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang terdiri atas :

1) Asumsi penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan penyesuaian dari hasil audit BPK atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

2) **Asumsi pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD, utamanya untuk pemenuhan penyertaan setoran modal sebagai pendiri PT. Jamkrida Jawa Tengah, PDAB Tirta Utama dan PD.BPR-BKK.

1.4. **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015**

Prioritas dan fokus sasaran pembangunan perubahan RKPD 2015, meliputi :

- a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :
 - 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola *quick win*;
 - 2) Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola *bottom up* di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah;
 - 3) Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
 - 4) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK;
 - 7) Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK;
 - 8) Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga;
 - 9) Peningkatan informasi sistem *on line* pencari kerja dan pasar kerja;
 - 10) Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha;
 - 11) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;
 - 12) Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja;

- 13) Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah;
 - 14) Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda;
 - 15) Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
 - 16) Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;
 - 17) Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;
 - 18) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.
- b. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus :
- 1) Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;
 - 2) Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
 - 3) Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekotruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantai Utara dengan koridor Pantai Selatan (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kali-bening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta);
 - 4) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;
 - 5) Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, underpass Jatingaleh Kota Semarang dan flyover Palur Sukoharjo serta JJLS);

- 6) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- 7) Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;
- 8) Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kabupaten/Kota.
- 9) Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya;
- 10) Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- 11) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;
- 12) Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 13) Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 14) Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;
- 15) Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ;
- 16) Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;
- 17) Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;
- 18) Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-

Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur underpass/layang;

- 19) Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan Pelabuhan Karimunjawa - Jepara;
 - 20) Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus :
- 1) Percepatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah;
 - 2) Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
 - 3) Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif;
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan;
 - 5) Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal;
 - 6) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana;
 - 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan;
 - 10) Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;
 - 11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta trafficking;
 - 12) Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;
 - 13) Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;
 - 14) Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 15) Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA;

- 16) Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti, serta pelestarian cagar budaya;
 - 17) Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan;
 - 18) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.
- d. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :
- 1) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah didukung rekayasa teknologi;
 - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;
 - 3) Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - 5) Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;
 - 6) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;
 - 7) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - 8) Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri;
 - 9) Implementasi kartu petani dan BBM nelayan;
 - 10) Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif;
 - 11) Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;

- 12) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB;
 - 13) Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan;
 - 14) Peningkatan budaya hemat energi.
- e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus :
- 1) Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - 3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup;
 - 4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum;
 - 6) Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
 - 7) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - 8) Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus:
- 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
 - 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;
 - 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;

- 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah

Gambaran kondisi umum daerah Provinsi Jawa Tengah terbagi atas sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia di sebelah selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, meliputi 573 Kecamatan, 7.809 Desa, dan 769 Kelurahan.

Topografi wilayah Provinsi Jawa Tengah beragam, meliputi dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah, dengan sekitar 53% wilayah Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl. Kemiringan lahan di wilayah Jawa Tengah juga bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Berbagai jenis dan struktur tanah di wilayah Jawa Tengah, dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi, meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol. Sedangkan jenis tanah alluvial yang ada di Jawa Tengah adalah Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Kekuningan, dan Aluvial Coklat Kelabu Gelap.

Kondisi hidrologis di wilayah Jawa Tengah, digambarkan dengan jumlah daerah jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah yang cukup banyak. Terdapat 18 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar; Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY) dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Serayu merupakan dua sungai di Jawa Tengah yang cukup besar dan panjang, memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1000 km², dengan debit yang cukup besar dan

perlu diwaspadai karena berisiko mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limbah.

Kondisi klimatologi di wilayah Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah, seperti juga wilayah Indonesia secara umum. Pada tahun 2014, suhu udara rata-rata berkisar antara 23⁰C–28⁰C dengan kelembaban udara berkisar antara 79%-90%. Curah hujan tertinggi pada tahun 2014 tercatat di Stasiun Meteorologi Geger, Batang sebesar 2.502 mm, dan hari hujan terbanyak sebesar 111 hari yang tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap.

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 terdiri dari lahan sawah sebesar 991.524 ha (30,47%) dan bukan lahan sawah sebesar 2.262.888 ha (69,53%). Sedangkan berdasarkan peruntukkan sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, terdiri dari 2.693.008 ha kawasan budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan dan permukiman) dan 561.404 ha kawasan lindung (hutan lindung, kawasan sempadan, suaka alam dan pelestarian alam, dan kawasan lindung karst).

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wilayah yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, terutama potensi peruntukan kawasan budidaya yaitu sebagai:

1. Kawasan hutan produksi dengan luas 546.290 ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), meliputi :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap seluas ± 183.930 ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar;
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 362.360 ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang;
2. Kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 ha (10,63% luas Jawa Tengah), meliputi 29 Kabupaten dan 5 Kota kecuali Kota Tegal;
3. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
 - a. Kawasan pertanian lahan basah, seluas ± 990.652 ha, yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 - b. Kawasan pertanian lahan kering ± 955.587 ha, yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
4. Kawasan peruntukan perkebunan seluas ± 885.344 ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 ha (96%), PTP Nusantara IX seluas 28.212 ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta seluas 11.464 ha (1%);

5. Kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
 - a. Kawasan peternakan besar dan kecil, yang diarahkan untuk semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 - b. Kawasan peternakan unggas, yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
6. Kawasan peruntukan perikanan sebesar ± 24.802 ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan, meliputi:
 - a. Kawasan perikanan tangkap, yang diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai, dan embung;
 - b. Kawasan perikanan budidaya baik perikanan air payau, air tawar, dan laut, yang diarahkan di semua kabupaten/kota se- Jawa Tengah;
7. Kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing-Dieng, kawasan Merapi-Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu;
 - b. Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi: Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condroidimuka;
 - c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marginal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal;
8. Kawasan peruntukan industri, meliputi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang;
9. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan pengembangan pariwisata koridor Borobudur – Prambanan –

Surakarta, koridor Borobudur – Dieng, koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora, koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga, koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes, koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga – Banjarnegara, dan koridor Cilacap – Kebumen – Purworejo;

10. Kawasan peruntukkan permukiman, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
11. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal; dan kawasan pulau-pulau kecil yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang dan Pulau Mandalika (Kabupaten Jepara), Pulau Marongan, Pulau Gede dan Pulau Sualan (Kabupaten Rembang), dan Pulau Nusakambangan (Kabupaten Cilacap).

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Tengah juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013, yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi dengan skor 158 dan menempati urutan/rangking 13 di tingkat nasional. Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap dan Purworejo.

Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dari frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2014 yang semakin meningkat, terutama kejadian bencana banjir dan tanah longsor, yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di semua sektor.

2.1.2. Aspek Demografi

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 33.264.339 jiwa atau sekitar 13,92% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 16.499.377 Jiwa (49,60%) dan perempuan sebanyak 16.764.962 Jiwa (50,40%), dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 98,42. Sebaran penduduk di Jawa Tengah tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberadaan penduduk di masing-masing kabupaten/kota, terbanyak berada di Kabupaten Brebes

(1.764.648 jiwa), paling sedikit di Kota Magelang (119.935 jiwa). Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2012. Kepadatan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2013 sebanyak 1.022 jiwa/km², angkanya tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2012. Kepadatan penduduk di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten, tertinggi adalah Kota Surakarta (11.534 jiwa/km²) dan terendah Kabupaten Blora (471 jiwa/km²). Penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 8.414.797 jiwa (25,30%), usia 15-64 tahun sebanyak 22.364.752 jiwa (67,23%) dan 65 tahun ke atas sebanyak 2.484.790 jiwa (7,47%).

Data selengkapnya mengenai jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2013*)				Kepadatan Penduduk Tahun
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis	
1.	Kab. Cilacap	839.836	836.253	1.676.08	100,43	784
2.	Kab. Banyumas	802.316	803.263	1.605.57	99,88	1.209
3.	Kab. Purbalingga	434.796	445.084	879.88	97,69	1.131
4.	Kab. Banjarnegara	445.915	444.006	889.92	100,43	832
5.	Kab. Kebumen	586.081	590.641	1.176.72	99,23	917
6.	Kab. Purworejo	347.987	357.496	705.48	97,34	682
7.	Kab. Wonosobo	390.029	379.289	769.31	102,83	781
8.	Kab. Magelang	613.112	608.569	1.221.68	100,75	1.125
9.	Kab. Boyolali	468.693	483.124	951.81	97,01	938
10.	Kab. Klaten	563.989	585.005	1.148.99	96,41	1.753
11.	Kab. Sukoharjo	420.983	428.523	849.50	98,24	1.820
12.	Kab. Wonogiri	458.090	484.287	942.37	94,59	517
13.	Kab. Karanganyar	415.578	424.593	840.17	97,88	1.088
14.	Kab. Sragen	427.320	444.669	871.98	96,10	921
15.	Kab. Grobogan	661.109	675.195	1.336.30	97,91	676
16.	Kab. Blora	415.696	428.748	844.44	96,96	471
17.	Kab. Rembang	303.481	305.422	608.90	99,36	600
18.	Kab. Pati	590.181	627.835	1.218.01	94,00	817
19.	Kab. Kudus	399.235	411.575	810.81	97,00	1.907

✓

20.	Kab. Jepara	575.043	578.170	1.153.21	99,46	1.148
21.	Kab. Demak	542.310	552.162	1.094.47	98,22	1.220
22.	Kab. Semarang	478.695	495.397	974.09	96,63	1.029
23.	Kab. Temanggung	366.897	365.014	731.91	100,52	841
24.	Kab. Kendal	469.892	456.920	926.81	102,84	925
25.	Kab. Batang	364.383	365.233	729.61	99,77	925
26.	Kab. Pekalongan	427.815	433.267	861.08	98,74	1.030
27.	Kab. Pemalang	633.482	646.114	1.279.59	98,04	1.265
28.	Kab. Tegal	703.494	711.515	1.415.00	98,87	1.609
29.	Kab. Brebes	886.698	877.950	1.764.64	101,00	1.064
30.	Kota Magelang	59.046	60.889	119.93	96,97	6.619
31.	Kota Surakarta	246.982	260.843	507.82	94,69	11.534
32.	Kota Salatiga	87.343	91.251	178.59	95,72	3.372
33.	Kota Semarang	806.647	838.153	1.644.80	96,24	4.402
34.	Kota Pekalongan	145.450	145.420	290.87	100,02	6.407
35.	Kota Tegal	120.773	123.087	243.86	98,12	7.070
	Jumlah 2013*)	16.499.377	16.764.962	33.264.33	98,42	1.022
	2012*)	16.495.705	16.774.502	33.270.20	98,34	1.022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

Keterangan : *) Angka Sementara Proyeksi SP 2010

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas sebagai berikut:

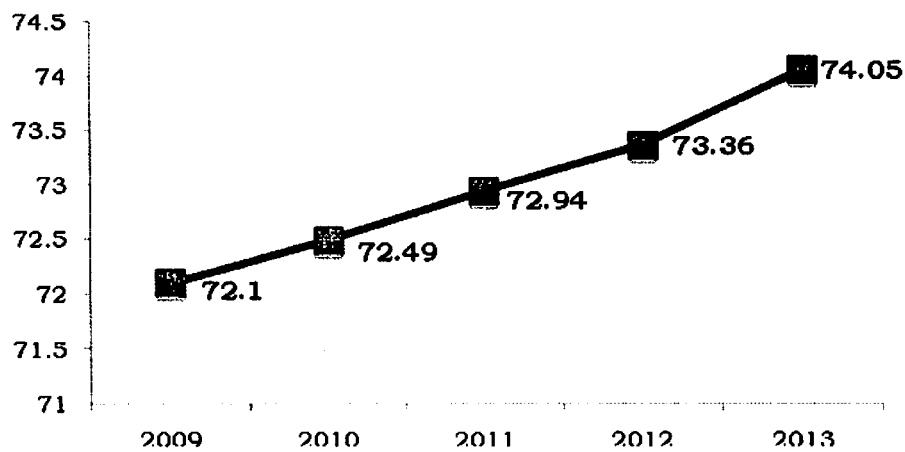
2.2.1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Jawa Tengah

Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan secara makro ditunjukkan dengan capaian indikator agregat meliputi:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH); capaian tingkat pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf); serta pengeluaran riil per kapita.

Periode tahun 2012-2013, IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 73,36 menjadi 74,05. Perkembangan IPM tahun 2009-2013, sebagaimana Gambar 2.1.

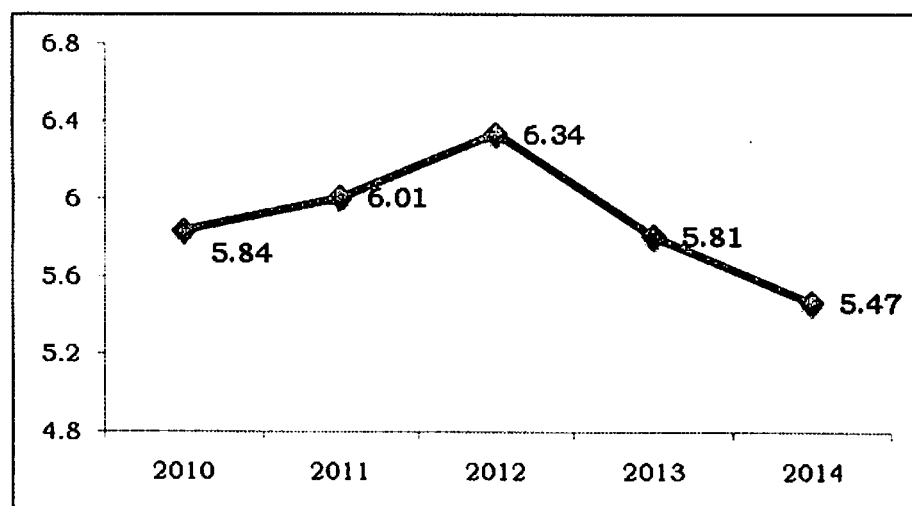


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 2.1.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 2010 – 2013 bergerak naik secara positif berturut-turut diangka 5,84%, 6,01% dan 6,34%, namun pada kurun waktu tahun 2013 – 2014 melambat secara berturut-turut dari 5,81% menjadi 5,47%. Gambaran pertumbuhan ekonomi sejak 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



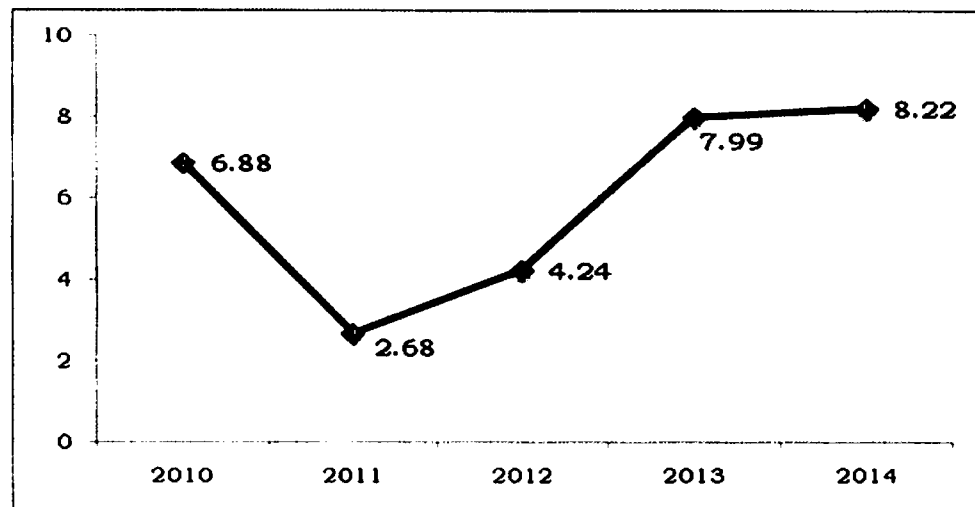
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2015

Gambar 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014 (%)

c. Inflasi

Inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada bulan Desember 2014 sebesar 8,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 (7,99%). Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama bensin, tarif listrik, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, cabai rawit, kontrak rumah, angkutan dalam kota, serta akademi/ perguruan tinggi. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

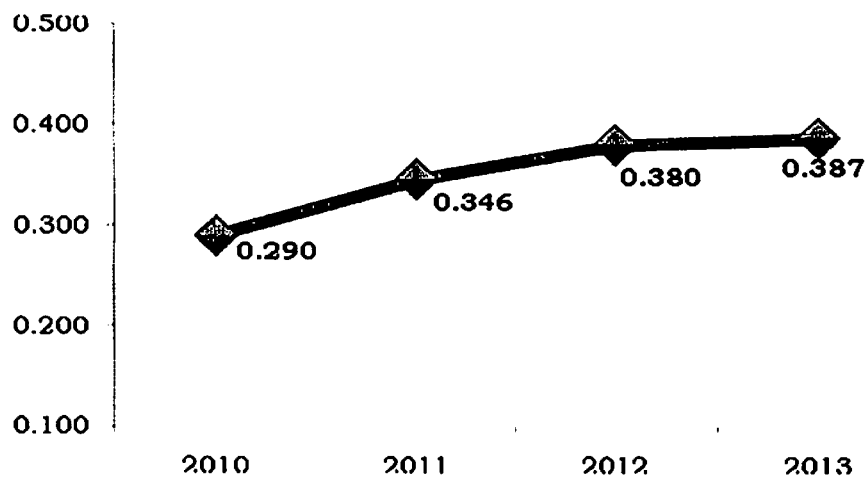


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2015

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2014 (%)

d. Indeks Gini

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2013 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung semakin meningkat, hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Jawa Tengah semakin melebar. Indeks Gini pada tahun 2010 sebesar 0,291 meningkat menjadi 0,387 pada tahun 2013. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 – 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2014

Gambar 2.4

Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

e. Indeks William

Indeks Williamson adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada kurun waktu tahun 2010 – 2013 kesenjangan antar wilayah mengalami fluktuasi, namun cenderung untuk semakin menurun dengan Indeks Williamson sebesar 0,6971 pada tahun 2010 menjadi sebesar 0,6954 di tahun 2013.

f. Nilai Tukar Petani

NTP dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persen. $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Mulai bulan Januari 2014, NTP menggunakan Tahun Dasar 2012=100 untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian, pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan dan perluasan cakupan sub sektor pertanian. NTP Bulan Desember 2014 sebesar 100,55.

g. Penduduk Miskin

Perkembangan kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan, namun jumlah absolutnya masih cukup besar dan belum sesuai dengan target pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 4,561 juta jiwa (13,58%) telah mengalami penurunan kurang lebih sebanyak 143,04 ribu

✍ ✓

(0,86%) dibanding tahun 2013 yang sebanyak 4,704 juta jiwa (14,44%).

Domisili penduduk miskin sebagian besar berada di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2014 penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,790 juta jiwa (15,35%) sedangkan di perkotaan sebanyak 1,777 juta jiwa (11,50%). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014

No	Tahun / Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
1	2010/Maret	2.258,94	3.110,22	5.369,16	14,33	18,66	16,56
2	2011/Maret	2.092,51	3.014,85	5.107,36	14,12	17,14	15,76
3	2011/Sept	2.175,82	3.080,17	5.255,99	14,67	17,50	16,21
4	2012/Maret	2.001,12	2.976,25	4.977,36	13,49	16,89	15,34
5	2012/Sept	1.946,51	2.916,90	4.863,41	13,11	16,55	14,98
6	2013/Maret	1.911,21	2.821,74	4.732,95	12,87	15,99	14,56
7	2013/Sept	1.870,73	2.834,14	4.704,87	12,53	16,05	14,44
8	2014/Maret	1.945,29	2.891,17	4.836,45	12,68	15,96	14,46
9	2014/Sept	1.777,53	2.790,29	4.561,83	11,50	15,35	13,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2015

h. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 0,996 juta orang (5,68%) menurun dibandingkan Tahun 2013 sebesar 1,02 juta orang (6,02%). Bulan Februari Tahun 2015, jumlah pengangguran sebesar 0,97 juta orang (5,31%). Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah diikuti sektor perdagangan, industri dan jasa. Tahun 2015 tingkat pengangguran Jawa Tengah ditargetkan dapat diturunkan menjadi 4,93 – 4,62%. TPT secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	TPT (%)
1	2010	1.046.883	6,21
2	2011	1.002.662	5,93
3	2012	962.010	5,63
4	2013	1.022.728	6,02
5	2014	996.344	5,68
6	2015	970.000 ^{*)}	5,31 ^{*)}

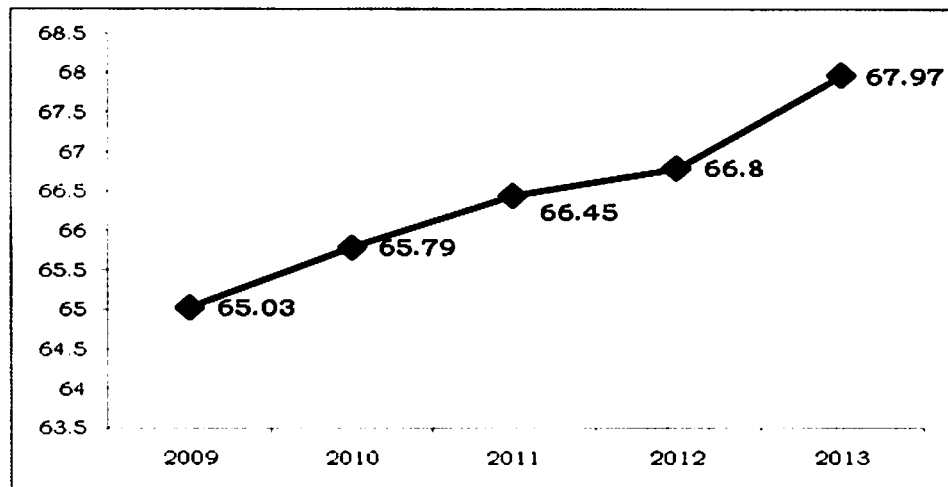
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2015

Ket : ^{*)} data per Februari 2015

✓

i. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM (UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja), namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 sebesar 65,03 meningkat menjadi 67,97 pada tahun 2013. Peningkatan IPG tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2015

Gambar 2.5.

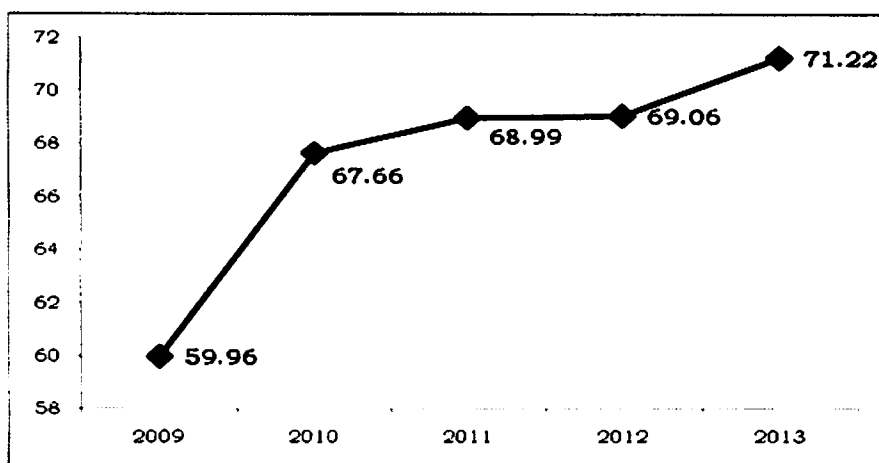
**Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013**

j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG adalah suatu indikator untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan perempuan di legislatif (parlemen); posisi perempuan dalam kedudukan manajerial, profesional, administrasi dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

IDG Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada Gambar 2.6.

✍️ ✓



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2015

Gambar 2.6
Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2012

2.2.2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Prioritas Dan Fokus Pembangunan Daerah

Dalam rangka memberikan dorongan serta optimalisasi pembangunan daerah, pengukuran kinerja pembangunan juga dilakukan terhadap prioritas dan fokus pembangunan tahun 2015. Pengukuran prioritas dan fokus pembangunan daerah 2015 bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah hingga Triwulan I Tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 terdiri atas:

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;
4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

Masing-masing prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dijabarkan kedalam fokus pembangunan daerah beserta indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Secara keseluruhan terdapat sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) indikator kinerja sebagai penjabaran prioritas RKPD 2015. Prestasi yang dihasilkan sampai dengan triwulan I tahun

2015, sebanyak 47 indikator (23,86%) telah mencapai target RKPD tahun 2015 (persentase capaian target sebesar 100% atau lebih), dengan perincian sebagai berikut pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Capaian Target Indikator Per Prioritas
s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Telah Tercapai	Persentase
1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;	22	5	22,73
2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;	27	5	18,51
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;	67	22	32,83
4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;	51	7	13,73
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;	13	3	23,08
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.	17	5	29,42
Jumlah	197	47	23,86

Pengukuran kinerja prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan,

Pencapaian prioritas peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan ditunjukkan dengan 22 (dua puluh dua) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini diketahui sebanyak 5 Indikator telah tercapai (persentase capaian target RKPD 2015 telah mencapai 100% atau lebih).

4 ✓

Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Prioritas 1 (Peningkatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdimensi Kewilayahan) s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :						
a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola quick win;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,58	72,19	72,58	99,46	Dinakert ransduk
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (%)	70,18	68,37	70,18	98	Dinakert ransduk
b. Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola bottom up di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendahPeningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;	Rasio Upah Minimum Kabupaten/ kota dibanding KHL (%)	97,5	98,96	97,50	102	Dinakert ransduk
c. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;						
d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik						

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja; e. Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK; f. Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK; g. Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga; h. Peningkatan informasi sistem on line pencari kerja dan pasar kerja; i. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha						
j. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;	Calon Transmigran yang meningkat ketrampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)	275 KK	0	275 KK	0	Dinakert ransduk
k. Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja;	Jumlah investor PMA/PMDN (proyek)	36	27	36	75,00	BPMD
	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Trilyun)	3,342	7,00	3,374	209,46	BPMD
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang)	1.342	573	1.342	42,69	BPMD
	Lama Perijinan Investasi (hari)	10	7	-	142,85	BPMD
l. Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada	APK PAUD/TK (4-6 tahun)	75,00	72	75	96	Dinas Pendidikan
	APK PAUD (0-6 tahun)	53,00	50	53	94,34	Dinas Pendidikan

9 ✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
jenjang pendidikan menengah; m. Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;	APK SD/SDLB/MI /Paket A	109,13	109,1	109,13	100	Dinas Pendidikan
	APM SD/SDLB/MI /Paket A	100	98,32	100	98,32	Dinas Pendidikan
	APK SMP/SMPLB /MTs/ Paket B	100,56	100,54	100,56	100	Dinas Pendidikan
	APM SMP/SMPLB /MTs/ Paket B	79,30	77,83	79,30	98,14	Dinas Pendidikan
	APK SMA/SMALB /MA/ SMK/ Paket C	74,00	73,05	74	98,72	Dinas Pendidikan
	APM SMA/SMALB /MA/ SMK/ Paket C	60,00	59,2	60	98,67	Dinas Pendidikan
	Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	35	16	35	45,71	Dinas Pendidikan
	Jumlah pelaku/ kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan	38.000 (23 SKPD)	8.307 (23 SKPD)	38.000	21,86	Dinas Pendidikan
n. Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda;	Jumlah kewirausahaan pemuda (orang/kelompok)	650 /85	130/17	650/85	20,00	Dinpora
o. Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;	Jumlah penerima manfaat menjelang purna bina yang dibina	1 MoU penanganan PM Balai Resos jelang purna bina (resosialisasi)	1 MOU penanganan PM Balai Resos jelang purna bina (resosialisasi)	0	0	Dinas Sosial
p. Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang)	34.807	2.260	34.807	6,49	Dinas Sosial
q. Peningkatan kemandirian dan penanganan	Persentase penanganan daerah	60	13,33	60	22,22	BKP

✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
kerentanan pangan di masyarakat.	rawan pangan					

Berdasarkan Tabel 2.5, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Rasio Upah Minimum Kabupaten/ kota dibanding KHL; Jumlah nilai investasi PMA/PMDN; Lama Perijinan Investasi; APK SD/SDLB/MI/Paket A; dan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B.

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja; Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja; Produktivitas Tenaga Kerja; Calon Transmigran yang meningkat ketrampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU); Jumlah investor PMA/PMDN; Rasio Daya Serap Tenaga Kerja; APK PAUD/TK (4-6 tahun); APK PAUD (0-6 tahun); APM SD/SDLB/MI/Paket A; APM SMP//SMPLB/Paket B; APK SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C; APM SMA/SMALB/ Paket C; Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan; Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan; Jumlah kewirausahaan pemuda (orang/kelompok); Jumlah penerima manfaat menjelang purna bina yang dibina; Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan; dan Persentase penanganan daerah rawan pangan. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Secara ringkas, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan, sebab sampai dengan triwulan I baru mencapai 72,19% dari target RKPD sebesar 72,58%. Begitu pula dengan ratio kesempatan kerja terhadap penduduk, baru mencapai 68,37% dari target RKPD sebesar 70,18%. Kinerja tergolong baik yaitu terkait kesejahteraan pekerja yang ditunjukkan oleh ratio UMK kabupaten/kota dibanding KHL yang semakin mendekati angka 100% sebesar 98,96% dan telah melebihi target RKPD sebesar 97,5%.

Kinerja urusan transmigrasi yang ditunjukkan indikator calon transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum sampai dengan triwulan I belum menghasilkan kinerja.

Kinerja urusan penanaman modal sampai dengan triwulan I tergolong baik, terlihat dari Jumlah nilai investasi

PMA/PMDN yang mencapai 7 trilyun rupiah dari target sebesar 3,342 trilyun rupiah. Walaupun demikian dilihat dari jumlah investor PMA/PMDN belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa nilai investasi dari masing-masing perusahaan nilainya besar. Penyerapan tenaga kerja sampai dengan triwulan I baru mencapai 573 dari 1.342 tergolong masih jauh dari target RKPD. Pelayanan perijinan investasi tergolong baik, dilihat dari Lama Perijinan Investasi hanya 7 hari dari target RKPD selama 10 hari.

Pada urusan pendidikan, kinerja berkaitan dengan partisipasi pendidikan terlihat hampir mendekati target RKPD 2015, baik APM pada jenjang SD sebesar 98,32% dari target 100%, jenjang APK SMP sebesar 100,54% dari target 100,56% APM SMP sebesar 77,83% dari target 79,30%, APM SMA/SMALB sebesar 59,2% dari target 60%, APM SMA sebesar 59,2% dari target 60%. Tentunya perlu dilakukan peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah. Jumlah desa vokasi yang dikembangkan capaiannya sebanyak 16 dari target 35 desa. Sementara itu jumlah Jumlah pelaku/ kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan telah tercapai sebanyak 8.307 dari target sebanyak 38.000 orang yang dilaksanakan oleh 23 SKPD.

Pada urusan sosial, capaian indikator jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan baru mencapai 2.260 orang dari target RKPD sebanyak 34.807 orang. Capaian indikator jumlah penerima manfaat menjelang purna bina yang dibina sampai dengan triwulan I belum ada kinerjanya, sehingga perlu ditingkatkan.

Pada urusan ketahanan pangan, capaian persentase penanganan daerah rawan pangan baru mencapai 13,33% dari target 60%.

b. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;

Pencapaian prioritas peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah ditunjukkan dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini telah tercapai sebanyak 6 Indikator (persentase capaian target RKPD 2015 telah mencapai 100% atau lebih).

Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Prioritas 2 (Peningkatan Infrastruktur yang Makin Berkualitas Guna Mendukung Pengembangan Wilayah) s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus:						
a. Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;	Persentase panjang jalan prov sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	74,80	71	72,20	95	Dinas Bina Marga
b. Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;	Persentase panjang jalan Prov dengan lebar > 6 m	64,88	57	59	88	Dinas Bina Marga
	Panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (km);	366,990	72,740	-	19,82	Dinas Bina Marga
	Persentase jalan dalam kondisi baik (%);	88,20	86,98	87,56	98,62	Dinas Bina Marga
c. Peningkatan penangananutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekotruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantura dengan koridor Pansela (Pemalang-Purbalingga-Kebumen);	Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan;	Meningkat	Meningkat	-	100	Dinas Bina Marga

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
Wiradesa-Kalibening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta);						
d. Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;	Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) (%);	86,71	52	85,66	60	Dinas Bina Marga
	Persentase panjang jalan yang sudah dileger (%);	86,24	82	80.60	95,08	Dinas Bina Marga
e. Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (di antaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, <i>underpass</i> Jatingaleh Kota Semarang dan <i>flyover</i> Palur Sukoharjo serta JJLS);	Terfasilitasinya peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota;	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan sinkronisasi penanganan Jalan Prov, Nasional dan Kab/Kota secara berkala	25	-	25	Dinas Bina Marga
f. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);	76,00	74,5	76	98,03	Dinas PSDA

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;						
g. Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (%);	54	52,83	54	97,83	Dinas PSDA
h. Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progotistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota;	Terfasilitasinya kerjasama dan pelaksanaan pembangunan waduk dan irigasi serta koordinasi penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota;	Berjalannya pembangunan Waduk dan Irigasi dan rapat koordinasi secara berkala bersama BBWS, Kelembagaan PSDA dan Pemerintah serta Kab/Kota. (7 kesepakatan)	- Tertandatanganinya 7 (Tujuh) Kesepakatan bersama dan 7 (Tujuh) Perjanjian kerja - Terealisasi sinya pelaksanaan pembangunan di 5 (Lima) waduk dan 1 (Satu) Daerah Irigasi - 1 (Satu) Waduk belum terealisasi kan (Waduk Matenggeng, Cilacap) - (6 kesepakatan)	7 kesepakatan	85,71	Dinas PSDA
i. Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya;	Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir;	3 % (5.000 Ha)	1.250 Ha	5.000 Ha	25	Dinas PSDA

✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
j. Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;	Terfasilitasinya penanganan rob dan banjir serta rehabilitasi dan rekonstruksi banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;	Terlaksananya penanganan banjir/rob dan rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir serta rapat koordinasi rencana penanganan banjir/rob kota Semarang (25%)	Terlaksananya penanganan banjir / rob dan banjir serta rapat koordinasi rencana penanganan banjir / rob Kota Semarang	-	25	Dinas PSDA
k. Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;	Cakupan pelayanan air minum perkotaan (%)	75,00	72,48	75,00	96,64	Dinas Cipkataru
	Cakupan pelayanan air minum perdesaan (%)	52,80	65,57	52,80	124,19	Dinas Cipkataru
	Cakupan pelayanan sanitasi (%)	72,00	76,94	72,00	106,86	Dinas Cipkataru
l. Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;	Rasio rumah layak huni	76,74	78,67	76,74	102,51	Dinas Cipkataru
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (%)	14,88	12,83	14,88	86,22	Dinas Cipkataru
m. Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;	Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan :					
	Jalan provinsi (%)	34,00	10,6	34	32	Dinas Perhubungan dan Kominfo
	Perlintasan KA (lokasi)	25	6	25	24	Dinas Perhubungan dan Kominfo
	Peningkatan kualitas perijinan dan kapasitas masyarakat	100 % perijinan yang di selesaikan	25 % perijinan yang di selesaikan	-	25	Dinas Perhubungan dan Kominfo
		Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosia-lisasi serta pelatihan kepada	25%	-	25	Dinas Perhubungan dan Kominfo

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat dan <i>stakeholders</i> perhubungan				
n. Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;	Terfasilitasinya pengembangan BRT	Pengembangan 1 Koridor BRT Kota Semarang/Kedungsapur, pembangunan shelter di Solo/Subosukawonosraten dan dokumen pengembangan BRT Purwokerto	2 Koridor	Pengembangan 1 Koridor BRT Kota Semarang/Kedungsapur, pembangunan shelter di Solo/Subosukawonosraten dan dokumen pengembangan BRT Purwokerto -	2 Koridor	Dinas Perhubungan dan Kominfo
o. Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ;	Terfasilitasinya pembangunan intermoda darat di Terminal Mangkang	Kesepakatan dan meningkatnya dukungan pemerintah dan <i>stakeholders</i>	25 %	-	25	Dinas Perhubungan dan Kominfo
p. Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;	Fasilitasi pembentukan pengelola transportasi perdesaan	Terbentuknya 1 uji coba pengelola transportasi perdesaan	2 Desa (Sidareja – Cinangsih; Kawunganten – Gandrungmangu	Terbentuknya ujicoba penelolaan transportasi perdesaan-	2 Desa (Sidareja – Cinangsih; Kawunganten – Gandrungmangu	Dinas Perhubungan dan Kominfo
q. Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;	Meningkatnya pelayanan ASDP di Jawa Tengah	Penyiapan operasional dan pengadaan 1 kapal ASDP serta pembangunan ASDP di Jepara dan Cilacap	2 lokasi	Penyiapan operasional dan pengadaan 1 kapal ASDP serta pembangunan ASDP di Jepara dan Cilacap	2 lokasi	Dinas Perhubungan dan Kominfo
r. Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-	Terfasilitasinya penyelesaian jalur KA strategis mendukung pengembangan wilayah di Jawa Tengah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan adanya penanganan dari Pemerintah Prov/	25	-	25	Dinas Perhubungan dan Kominfo

2 ✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur <i>underpass</i> /layang ;		Pemerintah / PT.KAI penyelesaian jalur KA strategis.				
s. Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan pelabuhan karimunjawa - jepara;	Terfasilitasinya pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan di Jawa Tengah	Terlaksananya pengembangan bandara Dewandaru (sisi darat) dan Wirasaba (rintisan penanganan); koordinasi dan pengendalian percepatan penyelesaian bandara Ahmad Yani; koordinasi aksesibilitas Bandara Adisumarmo; Dukungan Pemerintah dalam penyelesaian jalan akses dan penanganan pelabuhan niaga terminal Kendal, pelabuhan Karimunjawa-Jepara dan koordinasi percepatan penyelesaian pengembangan pelabuhan Tanjung Emas	25	-	25	Dinas Perhubungan dan Kominfo
t. Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.	Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi	SIM dapat akomodasi "kontrol" masyarakat dan mulai tersedianya data infrastruktur kewenangan Kab/Kota dan Nasional secara bertahap.	100 % GRMS	-	100 %	Dishubk ominfo

✓

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan; Cakupan pelayanan air minum perdesaan; Cakupan pelayanan sanitasi; Rasio rumah layak huni; dan Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Persentase panjang jalan prov sebagai jalan kolektor (MST > 8 Ton); Persentase panjang jalan Prov dengan lebar > 6 m; Panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (km); Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) (%); Persentase panjang jalan yang sudah dileger; Terfasilitasinya peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan nasional dan kab/ kota; Persentase pemenuhan kebutuhan air baku; Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik; Terfasilitasinya kerjasama dan pelaksanaan pembangunan waduk dan irigasi serta koordinasi penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota; Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir; Terfasilitasinya penanganan rob dan banjir serta rehabilitasi dan rekontruksi banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota; Cakupan pelayanan air minum perkotaan; Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani; Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan: Jalan provinsi; Perlintasan KA; Peningkatan kualitas perijinan dan kapasitas masyarakat; Terfasilitasinya pengembangan BRT; Terfasilitasinya pembangunan intermoda darat di Terminal Mangkang; Fasilitasi pembentukan pengelola transportasi perdesaan; Meningkatnya pelayanan ASDP di Jawa Tengah; Terfasilitasinya penyelesaian jalur KA strategis mendukung pengembangan wilayah di Jawa Tengah; dan Terfasilitasinya pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan di Jawa Tengah. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pada urusan pekerjaan umum, terlihat Persentase panjang jalan prov sebagai jalan kolektor (MST > 8 Ton) capaiannya baru 71% dari target 74,80%. Persentase panjang jalan Provinsi dengan lebar > 6 m baru mencapai 57% dari target sebesar 64,88%. Persentase jalan dalam kondisi baik baru mencapai 86,98% dari target 88,20%. Diperkirakan target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2015. Sedangkan untuk pencapaian panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya merupakan bagian dari indikator capaian

persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST 8 ton) dan persentase panjang jalan provinsi dengan lebar ≥ 6 m.

Berkaitan dengan irigasi, capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai dengan triwulan I baru mencapai 74,5% dari target sebesar 76%. Sementara itu Persentase pemenuhan kebutuhan air baku mencapai 52,83% dari target sebesar 54%. Sampai dengan triwulan I telah dihasilkan tertandatanganinya 6 kesepakatan dari target sebanyak 7 kesepakatan. Berkaitan dengan penanganan banjir, capaian indikator Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir belum sesuai dengan target, dengan capaian sebesar 1.250 Ha dari target sebesar 5.000 Ha.

Berkaitan dengan pemenuhan sanitasi dan air bersih, Cakupan pelayanan air minum perdesaan telah mencapai target yaitu sebesar 65,57% dari target sebesar 65,57%, sedangkan Cakupan pelayanan air minum perkotaan sebesar 72,48% dari target 75,00%. Cakupan pelayanan sanitasi telah mencapai 76,94% dari target 72,00%.

Pada urusan perumahan, kinerja indikator tergolong baik, terlihat dari capaian Rasio rumah layak huni sampai dengan triwulan I sebesar 78,67%, telah melampaui target sebesar 76,74%. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 12,83% dari target 14,88%.

Pada urusan perhubungan, pencapaian target RKPD hampir seluruhnya baru 25% dari angka target. Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan pada jalan provinsi baru mencapai 10,6% dari target sebesar 34%, pada Perlintasan KA baru mencapai 6 lokasi dari target 25 lokasi.

Pada urusan komunikasi dan informatika, telah dihasilkan capaian meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi sebesar 100% (*Government Resources Manajemen System/GRMS*).

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;

Pencapaian prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas ditunjukkan dengan 67 (enam puluh tujuh) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini telah tercapai sebanyak 22 Indikator. Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.7:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Prioritas 3 (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Pelayanan Dasar yang Makin Luas)
s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus :						
a. Peningkatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah; b. Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal; c. Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif; d. Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan; e. Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal; f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	APK PAUD/TK (4-6 tahun)	75,00	72	75	96	Dinas Pendidikan
	APK PAUD (0-6 tahun)	53,00	50	53	94,34	Dinas Pendidikan
	APK SD/SDLB/MI/ Paket A	109,13	109,1	109,13	100	Dinas Pendidikan
	APM SD/SDLB/MI/P aket A	100	98,32	100	98,32	Dinas Pendidikan
	APK SMP/SMPLB/M Ts/ Paket B	100,56	100,54	100,56	100	Dinas Pendidikan
	APM SMP/SMPLB/M Ts/ Paket B	79,30	77,83	79,30	98,15	Dinas Pendidikan
	APK SMA/SMALB/M A/ SMK/ Paket C	74,00	73,05	74,00	98,72	Dinas Pendidikan
	APM SMA/SMALB/M A/ SMK/ Paket C	60,00	59,2	60,00	98,67	Dinas Pendidikan
	APK Pendidikan Khusus	56,00	54	56,00	96,43	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,08	0,09	0,08	88,89	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,25	0,30	0,25	83,33	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,06	0,06	0,06	100	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SD/MI dan Paket A	99,97 dan 95,40	0	99,97 dan 95,40	0	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP/MTs dan Paket B	99,19 dan 96,25	0	99,19 dan 96,25	0	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK dan Paket C	99,96 dan 98,25	0	99,96 dan 98,25	0	Dinas Pendidikan
	Nilai Rata-Rata SD/MI	7,11	0	7,11	0	Dinas Pendidikan
	Nilai Rata-Rata SMP/MTs	6,87	0	6,87	0	Dinas Pendidikan

✍ ✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
	Nilai Rata-Rata SMA/MA/SMK	7,74	0	7,74	0	Dinas Pendidikan
	% Buta aksara > 15 Th	3,00	3,4	3,00	113,33	Dinas Pendidikan
	% Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan	65	95,02	65	146,18	Dinas Pendidikan
	% Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	79	98,82	79	125,09	Dinas Pendidikan
	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	84	82	84	97,62	Dinas Pendidikan
	% SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	% SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	% SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	% Pendidik berkualifikasi S1/D4	76	78,99	76	104	
g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; h. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana; i. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan;	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	118	115 kasus	118	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	12,00	1.271 kasus	12	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH)	11,85	1.493 kasus	11,85	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian DBD (%)	<1	1,89	<1	52,91	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan DBD (per100.000 pddk)	<20	19,76	<20	100	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Gizi Buruk (%)	0,05	904 kasus	0,05	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Penemuan Kasus Baru TB	117,00	41 (13.184)	117,00	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS	16,00	HIV/AIDS 345/224 kasus	16,00	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	6,20	PB/MB – 37/200 kasus	6,20	NA	Dinas Kesehatan

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
	Angka Penemuan Kasus Diare Balita	44,00	45.495 kasus	44,00	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Penemuan Kasus ISPA Balita	48,00	115.783 kasus	48,00	NA	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan Malaria	0,07	0,01	0,07	100	Dinas Kesehatan
	Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<10 atau <25	57.040 kasus (52,29%)	<10 atau <25	48,07	Dinas Kesehatan
	Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<50	15,93%	<50	100	Dinas Kesehatan
	Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (Unit)	750	250	750	33,33	Bapermasdes
j. Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;	Produk Kebijakan PUG (buah)	3	2	3	66,67	BP3AKB
	Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan (buah)	1	0 Pelaksanaan bulan Agustus	1	0	BP3AKB
	Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi (%)	48	47	48	97,92	BP3AKB
	Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Prov (%)	19,2		19,2		BP3AKB
	Rasio Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJM, Renstra SKPD dan Renja SKPD (%)	65,99	65,69	65,69	99,55	BP3AKB
k. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan	Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak	77,1	88,57	77,1	114,88	BP3AKB
	Rasio KDRT pada perempuan dan anak	0,026	0,4952	0,026	1,90	BP3AKB

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
kekerasan berbasis gender dan anak, serta <i>trafficking</i> ;						
l. Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang; m. Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;	<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)</i>	78,00	75,57	78	96,88	BP3AKB
	DO KB (%)	14,50	7,70	14,50	188,31	BP3AKB
	<i>Unmetneed (%)</i>	9,75	10,41	9,75	93,10	BP3AKB
	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (%)	2,20	2,42	2,20	90,90	BP3AKB
n. Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;	Jumlah sarana dan prasarana sosial	10	0	12	0	Dinas Sosial
	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.368	525	2.368	22,17	Dinas Sosial
o. Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA;	Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	11 desa inovatif; 6 kab/kota inovatif; 6 klaster	0	11 desa inovatif; 6 kab/kota inovatif; 6 klaster	0	Balitbang
p. Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti serta pelestarian cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	10,5	0	2,5	0	Dinbudpar
	Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa (%)	100	100	100	100	Disdik
q. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan	Jumlah Organisasi Pemuda (OK/org)	59/ 70	0	59/70	0	Dinpora
	Jumlah Organisasi Olah Raga (Pengurus Provinsi)	72	72	72	100	Dinpora
	Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	50	50	50	100	Dinpora
	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	100	Dinpora

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
pembinaan dan kualitas keolahragaan;	Jumlah klub OR	150 klub	150 klub	150 klub	100	Dinpora
	Jumlah PPLPD	15 PPLPD (160 org)	15 PPLPD (160 orang)	15 PPLPD (160 org)	100	Dinpora
	Jumlah Klub Olahraga/ Ekstra Kurikuler	105 Klub	0	105 Klub	0	Dinpora
r. Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun (orang)	807.085	225.566	807.085	27,94	Badan Arpus
	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi (eksemplar)	223.946	231.229	223.946	103,25	Badan Arpus
	Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan	921	0	921	0	Badan Arpus

Berdasarkan Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: APK SD/SDLB/MI/Paket A; APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B; Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK; % Buta aksara > 15 Tahun; % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan; % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan; % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi; % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi; % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi; Prosentase pendisik berkualifikasi S1/D4; Angka Kesakitan DBD; Angka Kesakitan Malaria; Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak; DO KB; Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa; Jumlah Organisasi Olah Raga (Pengurus Provinsi); Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3); Jumlah Cabang Olahraga Unggulan; Jumlah klub OR; Jumlah PPLPD; dan Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi. Capaian ini tentunya perlu dipertahankan agar sampai dengan akhir tahun statusnya tetap telah tercapai.

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: APK PAUD/TK (4-6 tahun); APK PAUD (0-6 tahun); APM SD/SDLB/MI/Paket A; APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B; APK SMA/SMALB/MA/ SMK/

Paket C; APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C; APK Pendidikan Khusus; Angka Putus Sekolah SD/MI; Angka Putus Sekolah SMP/MTs; % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan; Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Balita (AKABA); Angka Kematian DBD; Prevalensi Gizi Buruk; Angka Penemuan Kasus Baru TB; Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta; Angka Penemuan Kasus Diare Balita; Angka Penemuan Kasus ISPA Balita; Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina; Produk Kebijakan PUG; Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan; Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi; Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Prov; Rasio Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJM, Renstra SKPD dan Renja SKPD; Rasio KDRT pada perempuan dan anak; Contraceptive Prevalence Rate/CPR; Unmetneed; Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun; Jumlah sarana dan prasarana sosial; Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS; Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah; Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; Jumlah Organisasi Pemuda; Jumlah Klub Olahraga/ Ekstra Kurikuler; Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun; Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pada urusan pendidikan, terlihat bahwa partisipasi pendidikan baik pada jenjang PAUD/TK (4-6 tahun) perlu ditingkatkan, karena baru mencapai 72% dari target RKPD sebesar 75%, dan APK PAUD (0-6 tahun) baru mencapai 50% dari target 53%. Capaian APK pada jenjang SD maupun SMP sudah mencapai lebih dari 100%, namun capaian APM belum mencapai angka ideal sebesar 100%, dan belum mencapai target RKPD tahun 2015. Pada jenjang SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C, baik APK maupun APM capaiannya masih kurang dari target, yaitu APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C sebesar 77,83% dari target 74,00%, dan APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C sebesar 73,05% dari target sebesar 74%. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus juga masih kurang dari target yaitu sebesar 54% dari target sebesar 56%. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs juga belum mencapai target, sedangkan pada Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK telah sesuai dengan target.

Mutu pendidikan belum bisa dilihat capaiannya pada triwulan 1, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan 2. Berkaitan dengan ketersediaan, sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan kondisi yang baik, terlihat dari persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan telah mencapai target RKPD, sedangkan persentase Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan capaiannya baru mencapai sebesar 82% dari target RKPD sebesar 84%. Seluruh sekolah pada jenjang SD, SMP, maupun SMA juga telah terakreditasi.

Pada urusan kesehatan, sampai dengan triwulan I tahun 2015, jumlah kasus kematian Ibu yang terjadi sebanyak 115 kasus, Kematian Bayi sebanyak 1.271 kasus, dan kasus kematian balita sebanyak 1.493 kasus, dan Prevalensi Gizi Buruk sebanyak 904 kasus. Dengan melihat capaian di atas, maka Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan sehingga kematian ibu, bayi, balita, serta gizi buruk bisa berkurang.

Penyakit menular dan penyakit tidak menular juga banyak terjadi, dengan capaian Angka Kesakitan DBD sebesar 19,76 per100.000 penduduk, Angka Penemuan Kasus Baru TB sebanyak 41 dari 13.184 kasus, Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS sebanyak 345/224 kasus, Angka Penemuan Kasus Baru Kusta sebanyak 37/200 kasus, angka kesakitan Malaria sebesar 0,01, Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 57.040 kasus, Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar 15,03%. Tentunya diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan.

Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan I telah menghasilkan sebanyak 2 produk kebijakan dari target sebanyak 3 produk; rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi sebesar 47% dari target 48%; Rasio Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJM, Renstra SKPD dan Renja SKPD sebesar 65,69% dari target 65,99%; Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak sebesar 88,57 dari target 77,1%; dan Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,49% dari target 0,026%. Kondisi ini menunjukkan bahwa KDRT masih banyak terjadi di Jawa Tengah, sehingga perlindungan perempuan dari tindak kekerasan perlu ditingkatkan.

Pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, capaian Contraceptive Prevalence Rate/CPR sebesar 75,57% lebih rendah dari target sebesar 78,00%; Unmetneed masih cukup tinggi sebesar 10,41% dari target 9,75%, dan DO KB sebesar 7,70% telah mencapai target sebesar 14,50%. Perkawinan usia dibawah 20 tahun masih belum mencapai target, terlihat dari Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 2,42% dari target sebesar 2,20%.

Pada urusan sosial, capaian kinerja masih rendah, terlihat dari Jumlah sarana dan prasarana sosial capaiannya masih nol dari target 10% dikarenakan baru dilaksanakan pada bulan juni; dan jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS capaiannya baru mencapai 525 orang dari target sebesar 2.368 orang.

Pada urusan kebudayaan, capaian kinerja juga masih rendah, terlihat dari Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan capaiannya masih nol dari target sebesar 10,5% karena baru akan dilaksanakan pada triwulan II, sedangkan Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa telah mencapai 100%.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga, jumlah organisasi pemuda capaiannya masih nol dari target 59 organisasi, disebabkan baru dilaksanakan pada bulan juni. Jumlah Organisasi Olah Raga telah sesuai target RKPD yaitu sebesar 72 pengurus provinsi. Begitu pula Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan capaian sebesar 50 orang sesuai dengan target RKPD, Jumlah Cabang Olahraga Unggulan sebanyak 8 cabor, Jumlah klub OR sebanyak 150 klub, dan Jumlah PPLPD 15 PPLPD (150 orang), Jumlah Klub Olahraga/ Ekstra Kurikuler capaian masih nol disebabkan baru akan dilaksanakan bulan juni, agustus dan oktober.

Pada urusan perpustakaan, capaian kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun baru mencapai 225.566 orang dari target selama 1 tahun sebanyak 807.085 orang, Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi sebanyak 231.229 eksemplar telah mencapai target sebesar 103,25%. Capaian Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan capaiannya masih nol dari target sebanyak 921 perpustakaan desa karena baru akan dilaksanakan pada bulan agustus (Triwulan III) menunggu SE gubernur tentang hibah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai target RKPD dan target RPJMD, diperlukan fasilitasi pengembangan perpustakaan desa sehingga dapat memenuhi standar perpustakaan desa.

d. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

Pencapaian prioritas peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan ditunjukkan dengan 51 (lima puluh satu) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini telah tercapai sebanyak 7 Indikator. Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.8:

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Prioritas 4 (Peningkatan perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dengan Dukungan Rekayasa Teknologi dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan) s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :						
a. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah didukung rekayasa teknologi;	Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas)	140	140	140	100	Dinkop dan UMKM
	Presentase koperasi sehat (%)	16,20	20,56	16,20	126,9	Dinkop dan UMKM
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;	Persentase koperasi aktif (%)	81,05	81,33	81,05	100,33	Dinkop dan UMKM
	Nilai ekspor Non Migas (Jt US\$)	5.171	1.296,99	5.171	25,08	Dinas Perindag
	Nilai impor non migas (Jt US\$)	5.082	1.521,62	5.082	29,94	Dinas Perindag
	Ekspor bersih perdagangan (Jt US\$)	89	(-224,63)	89	0	Dinas Perindag
	Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	5,20	2,04	5,20	39,23	Dinas Perindag
c. Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (org)	29.218.463	4.865.584	29.218.463	16,65	Dinas Budpar

✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
untuk meningkatkan daya tarik wisata;	Jumlah kunjungan Wisa-tawan Mancanegara (org)	395.261	88.425	395.261	22,37	Dinas Budpar
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	2,94	1,43	2,94	48,64	Dinas Budpar
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,41	2,08	2,41	86,31	Dinas Budpar
	Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah)	671.002	1.237.138	671.002	184,37	Dinas Budpar
	Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dollar)	490,14	507,5	490,14	103,54	Dinas Budpar
	Jumlah Daya Tarik Wisata	395	467	418	118,23	Dinas Budpar
	Jumlah Desa Wisata	165	126	155	76,36	Dinas Budpar
d. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;	Produksi Padi (ton)	10.228.197	5.201.621	10.228.197	50,86	Dinperta n TPH Dinbun Dinakkes wan Biro Bina Produksi
e. Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;	Produksi Jagung (ton)	3.016.834	1.460.610	3.016.834	48,42	
	Produksi Kedelai (ton)	143.389	68.237	143.389	47,59	
f. Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;	Produksi Tebu (ton)	5.228.010	Belum ada produksi baru giling awal Juni	5.228.010		
	Produksi Kelapa (ton)	186.198	37.562,96	186.198	20,17	
	Produksi Daging (Kg)	282.661.352	46.030.583	282.661.352	16,28	
	Produksi Susu (liter)	101.465.006	24.894.281	101.465.006	24,53	
g. Pengembangan	Produksi Telur (Kg)	285.726.795	59.653.328	285.726.795	20,88	
	Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas	20	10	20	50	Set Bakorluh
	Jumlah Posluhdes yang berkualitas	50	24	50	48	Set Bakorluh
	Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan	1	Proses penyusunan Pergub SKPT	1	0	BKP

8 ✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; h. Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri; i. Implementasi kartu petani dan BBM nelayan; j. Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif; k. Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;	Ketersediaan Pangan Utama (ton) Beras	5.746.958	5.732.400 (ASEM)	5.746.958	99,75	BKP
	Persentase Penguatan cadangan pangan (%)	80	58,99	80	73,71	BKP
	Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga, & akses pangan di daerah (%)	100	88,41	100	88,41	BKP
	Penanganan daerah rawan pangan (%)	60	13,33	60	22,23	BKP
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80	10	80	12,5	BKP
	Skor PPH	91,13	Masih dalam tahap pengumpulan data	91,13	0	BKP
	Produksi Perikanan tangkap (Ton)	306.868,21	Data dari TPI belum masuk	306.868,21	0	Dinas Lutkan
	Produksi Perikanan budidaya (Ton)	309.949,63	267.183,09 (ASEM)	309.949,63	86,20	Dinas Lutkan
	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	19,59	-	19,59	NA	Dinas Lutkan
	Rasio Elektrifikasi (%)	87,42	88,95	87,42	101,75	Dinas ESDM
l. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB; m. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan; n. Peningkatan budaya hemat energi.	Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi (%)	7,74	7,01	7,74	90,57	Dinas ESDM

Berdasarkan Tabel 2.8, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Jumlah Produk/komoditas OVOP; Presentase koperasi sehat; Persentase koperasi aktif; Rata-rata pengeluaran

belanja wisatawan nusantara; Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara; Jumlah Daya Tarik Wisata; Rasio Elektrifikasi.

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Nilai ekspor Non Migas; Nilai impor non migas; Ekspor bersih perdagangan; Pertumbuhan Industri Pengolahan; Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara; Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara; Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara; Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara; Jumlah Desa Wisata; Produksi Padi; Produksi Jagung; Produksi Kedelai; Produksi Tebu; Produksi Kelapa; Produksi Daging; Produksi Susu; Produksi Telur; Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas; Jumlah Posluhdes yang berkualitas; Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan; Ketersediaan Pangan Utama Beras; Persentase Penguatan cadangan pangan; Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; Penanganan daerah rawan pangan; Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; Skor PPH; Produksi Perikanan tangkap; Produksi Perikanan budidaya; Tingkat konsumsi ikan; Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pada urusan koperasi dan UKM terlihat bahwa capaian kinerja sampai dengan triwulan I tergolong baik, kinerja Jumlah Produk/komoditas OVOP telah mencapai sebanyak 140 komoditas sesuai dengan target. Begitu pula dengan Presentase koperasi sehat sebesar 20,56% dari target sebesar 16,20%, dan Persentase koperasi aktif sebanyak 81,33% dari target sebesar 81,05%.

Pada urusan perdagangan, kinerjanya kurang baik, sebab Ekspor bersih perdagangan bernilai negatif, artinya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nilai ekspor sampai dengan triwulan I sebesar 1.296,99 Jt US\$ dari target 5.171 Jt US\$, sedangkan nilai impor sebesar 1.521,62 Jt US\$ dari target sebesar 5.082 Jt US\$. Dengan melihat kondisi demikian, maka perlu ada peningkatan upaya dalam rangka meningkatkan nilai ekspor produk/komoditas unggulan Provinsi Jawa Tengah.

Pada urusan perindustrian, kinerja Pertumbuhan Industri Pengolahan juga perlu ditingkatkan, sebab capaiannya baru mencapai 2,04% dari target sebesar 5,20%.

Pada urusan pariwisata, Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara sampai dengan triwulan I baru mencapai 4.865.584 orang dari target sebanyak 29.218.463 orang. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara juga perlu ditingkatkan karena baru

mencapai 88.425 orang dari target 395.261 orang. Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara di Jawa Tengah baru mencapai 1,43 hari dari target sebesar 2,94 hari, sedangkan Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai sebesar 2,08 hari dari target sebesar 2,41 hari. Dilihat dari pengeluaran belanja wisatawan, untuk wisatawan nusantara sebesar Rp1.237.138,- dari target Rp 671.002,-, sedangkan pengeluaran belanja wisatawan mancanegara sebesar 507,5 US dollar dari target 490,14 US dollar. Pengembangan obyek wisata capaiannya tergolong baik, dari target sebanyak 395 obyek telah tercapai sebanyak 467 obyek. Sementara itu Jumlah desa wisata capaiannya baru mencapai 126 desa dari target sebanyak 165 obyek.

Pada urusan pertanian terlihat bahwa produksi padi perlu ditingkatkan karena sampai dengan triwulan I belum mencapai target, yaitu 5.201.621 ton dari target sebesar 10.228.197 ton, sedangkan produksi jagung juga masih dibawah capaian target yaitu sebesar 1.460.610 ton dari target sebanyak 3.016.834 ton. Produksi kedelai baru mencapai 68.237 ton dari target sebesar 143.389 ton. Capaian produksi kelapa, daging, susu, dan telur juga belum tercapai sesuai target RKPD karena baru sampai dengan triwulan I. Tebu belum ada produksi, karena baru giling pada awal Juni 2015. Berkaitan dengan penyuluhan, kinerja indikator jumlah balai penyuluhan yang berkualitas sebesar 10 balai dari target 20 balai, sedangkan jumlah pohluhdes yang berkualitas sebanyak 24 pohluhdes dari target sebanyak 50 pohluhdes.

Pada urusan ketahanan pangan, jumlah regulasi kedaulatan pangan baru dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur; ketersediaan pangan utama mencapai 5.732.400 ton dari 5.746.958 ton, penguatan cadangan pangan baru terealisasi sebesar 58,99% dari target 80%. Berkaitan dengan distribusi pangan, capaian persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah telah mencapai 88,41% dari target sebesar 100%. Sementara itu capaian penanganan daerah rawan pangan baru mencapai 13,33% dari target 60%, dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 10% dari target sebesar 80%. Sedangkan skor PPH masih dalam tahap pengumpulan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kinerja dalam upaya peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan.

Pada urusan kelautan dan perikanan, kinerja perikanan budidaya sampai dengan triwulan I telah mencapai 267.183,09 ton dari target sebesar 309.949,63 ton, sedangkan Produksi Perikanan tangkap belum diketahui capaiannya, karena data dari

TPI belum masuk. Angka konsumsi ikan belum dapat dihitung pada triwulan 1. Perlu ada upaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Pada urusan energi dan sumberdaya mineral, kinerja sampai dengan triwulan I ditunjukkan dengan Rasio Elektrifikasi rumah tangga sebesar 88,95% dari target RKPD sebesar 87,42%. Persentase pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi belum mencapai target RKPD, yaitu sebesar 7,01% dari target 7,74%. Tentunya pemanfaatan EBT perlu ditingkatkan capaiannya pada tahun 2015 ini.

e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;

Pencapaian prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya ditunjukkan dengan 13 (tiga belas) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini telah tercapai sebanyak 3 Indikator. Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.9:

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Prioritas 5 (Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsinya) s/d Triwulan I Tahun 2015

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus :						
a. Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Informasi status mutu air (SPM) (%)	100	87,5	100 (8 sungai)	87,5	BLH
	Informasi status mutu udara ambien (SPM) (%)	100	0	100	0	BLH
	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) (%)	100	100	100	100	BLH
b. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;						
c. Pengendalian alih						

✓

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; d. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; e. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum; f. Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya; g. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat; h. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dgn rencana tata ruang (%)	64	63	64	98,44	Dinas Ciptataru
	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	5% (31.730,05 ha)	1,67% (530 ha)	5	34	Dinas Kehutan an
	Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	10.000	6.150	10.000	61,50	Dinas Kehutan an
	Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang (%)	20	0	20	0	Dinas Kehutan an
	Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan (%)	86	75,4	86	87,68	Dinas ESDM
	Kualitas RTH di wilayah perkotaan (Ha)	40	77,00	40	192,5	BLH
	Luas penanaman mangrove (Ha)	8,13	0	8,13	0	Dinlutkan
	Luas terumbu karang buatan (Ha)	5,13	0	5,13	0	Dinlutkan
	Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi (%)	17,47	17,3	17,47	99,02	Dinas ESDM
	Kabupaten/ko ta memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana	35	35	35	100	Set. BPBD

Berdasarkan Tabel 2.9, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM); Kualitas RTH di wilayah perkotaan; dan Kabupaten/kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana.

✓

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Informasi status mutu air (SPM); Informasi status mutu udara ambien (SPM); Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang; Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis; Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan; Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang; Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditingkatkan; Luas penanaman mangrove; Luas terumbu karang buatan; Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pada urusan lingkungan hidup terlihat capaian informasi status mutu air baru mencapai 87,5% dari target sebesar 100%, sedangkan Informasi status mutu udara ambien belum ada realisasi capaian. Untuk Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti telah mencapai target sebesar 100% dari sebanyak 14 temuan yang ada.

Pada urusan penataan ruang, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sudah tercapai 63% dari target 64 %.

Pada urusan kehutanan, capaian kinerja perlu ditingkatkan, terlihat dari capaian persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru mencapai 1,67% dari target sebesar 5%; Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan baru mencapai 6.150 ha dari target sebanyak 10.000 ha; dan persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang capaiannya masih nol karena baru mulai pada triwulan II dan triwulan III.

Pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditingkatkan sebesar 75,4% dari target sebesar 86%. Untuk persentase upaya pmitigasi bencana alam geologi mencapai 17,3% dari 17,47%.

Pada urusan lingkungan hidup, untuk kualitas RTH di wilayah perkotaan sebesar 77% dari target sebesar 40%.

Pada urusan kelautan dan perikanan yaitu luas penanaman mangrove capaiannya sampai dengan triwulan I masih nol, begitu pula dengan capaian indikator Luas terumbu karang buatan. Hal tersebut dikarenakan baru akan dimulai pada triwulan II

Dari 35 Kabupaten/Kota telah memiliki prasarana/sarana penanggulangan bencana.

f. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

Pencapaian prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah ditunjukkan dengan 17 (tujuh belas) indikator/target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, target RKPD tahun 2015 pada prioritas ini telah tercapai sebanyak 5 Indikator.

Secara rinci pencapaian prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut pada Tabel 2.10:

Tabel 2.10

**Capaian Kinerja Prioritas 6 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Wilayah)
s/d Triwulan I Tahun 2015**

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus :						
a. Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan;	Persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan (%)	2,45	38,37	2,45	1.566	BP3AKB
	Persentase keterwakilan publik perempuan di lembaga parlemen (%)	30	24	30	80	BP3AKB
	Persentase perempuan di lembaga swasta (%)	93,88	0	93,88	0	BP3AKB
b. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah	68,11	0	68,11	0	Bakesbang-polinmas
	Penegakkan Perda Provinsi (%)	100	30	100	30	Satpol PP Biro Hukum
	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35 kabupaten /kota	16 kabupaten /kota	35 kabupaten/ kota	46	Satpol PP Biro Hukum
	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Penangan an konflik sosial 85%	140 konflik dan rencana	85%	37	Bakesbang-polinmas

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah			Target RPJMD Pada Tahun 2015	% Capaian	SKPD
	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian			
1	2	3	4	5	6	7
			315 konflik (44,44%)			
c. Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;	Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka	eselon I, II, III, IV	Eselon II	eselon I, II, III, IV	30	BKD
d. Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.	<i>Indonesia Governance Indeks (IGI)</i>	5,94		5,94		15 SKPD
	Peningkatan PAD (%)	19,53	2.222.479.830.785 (19%)	11.696.822.243.000 (19,53%)	19	Biro Keuangan DPPAD
	Persentase Aset yang dikelola dengan baik (%)	85	111.076.880 (30%)	85	30	DPPAD
	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	15 SKPD	0	15 SKPD	0	Inspektorat
	Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	100	Dinasnake rtransduk capil Biro Tapem
	Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	12	12	12	100	Badan Arpus
	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	59	59	59	100	Dishubko minfo
	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu (dok)	1	1	1	100	Bappeda
	Evaluasi Dokumen perencanaan daerah (dok)	1	0	1	0	Bappeda

Berdasarkan Tabel 2.10, dapat diketahui bahwa indikator yang capaiannya s/d triwulan I telah mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu: Persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan; Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK; Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku; Jumlah SKPD yang

✓

mengembangkan teknologi informasi; dan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu.

Sementara itu, indikator yang capaiannya s/d triwulan I belum mencapai target RKPD tahun 2015 yaitu:; Persentase keterwakilan publik perempuan di lembaga parlemen; Persentase perempuan di lembaga swasta; Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah; Penegakkan Perda Provinsi; Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Penanganan gangguan keamanan dalam negeri; Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka; *Indonesia Governance Indeks* (IGI); Peningkatan PAD; Persentase Aset yang dikelola dengan baik; Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Evaluasi Dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator tersebut tentu capaiannya perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan APBD tahun 2015 pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terlihat persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan telah melebihi target yang ada, persentase keterwakilan perempuan di lembaga parlemen sebesar 24% dari target 30%, sedangkan persentase perempuan di lembaga swasta, dan persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan data BPS belum tersedia.

Pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, untuk Indeks Demokrasi Indonesia capaiannya masih nol, dikarenakan belum dinilai; capaiannya sebesar 140 konflik (44,44%) dari target sebanyak 85%. Sedangkan pada indikator penegakan perda provinsi realisasi capaian 30% dari target 100%; aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi realisasi 16 kabupaten/kota dari target 35 kabupaten/kota.

Pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian beberapa capaian kinerja perlu ditingkatkan. Capaian promosi jabatan struktural secara terbuka sampai dengan triwulan I telah terlaksana untuk eselon II, sedangkan untuk Eselon III dan IV baru dilaksanakan pada bulan april (triwulan II). PAD sampai dengan triwulan I baru mencapai 19% dari target 19,53%. Persentase aset yang dikelola dengan baik, realisasi capaian 35% dari target 85%. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah capaiannya masih nol, direncanakan baru selesai bulan Agustus.

Pada urusan kependudukan dan catatan sipil, capaian Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK telah mencapai 35 kab/kota, sesuai dengan target RKPD.

Pada urusan kearsipan, capaian Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku telah mencapai sebanyak 12 SKPD, sesuai dengan target RKPD.

Pada urusan komunikasi dan informatika, Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi telah mencapai 59 SKPD, sesuai dengan target RKPD.

Pada urusan perencanaan pembangunan, capaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu telah tercapai sebanyak 1 dokumen berupa RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, sedangkan evaluasi dokumen perencanaan daerah disusun akhir Tahun 2015.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015;
- b. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- c. Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 meliputi upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan serta kedaulatan energi;
- d. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, upaya penanggulangan, peningkatan kesiap-siagaan dan tanggap darurat bencana;
- e. Perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kegiatan dalam Perubahan RKPD 2015, selanjutnya dipersandingkan alokasi anggarannya sebelum dan sesudah perubahan dengan diklasifikasikan ke dalam kategori : kegiatan baru dalam APBD Induk dan Perubahan RKPD 2015; kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, target dan lokasi, sebagai berikut :

3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2015 per SKPD

Tabel 3.1
Proyeksi Balanja Langsung SKPD Pada Perubahan RKPD Tahun 2015

Dalam ribuan rupiah

URUSAN/SKPD	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	6
<u>URUSAN WAJIB</u>			
Pendidikan	196.056.881	196.981.978	925.097
Dinas Pendidikan	196.056.881	196.981.978	925.097
Kesehatan	1.258.315.635	1.699.054.530	440.738.895
Dinas Kesehatan	152.630.931	160.779.896	8.148.965
RSUD dr. Moewardi Surakarta	472.965.900	683.707.284	210.741.384
RSUD Prof.dr. Margono Soekarjo Purwokerto	288.308.000	399.540.417	111.232.417
RSUD Tugurejo Semarang	138.567.225	176.960.765	38.393.540
RSUD Kelet Donorojo Jepara	74.003.977	78.029.306	4.025.329
RSJD dr. Amino Gondo Utomo Semarang	47.568.746	61.032.754	13.464.008
RSJD Surakarta	43.245.956	72.156.735	28.910.779
RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten	41.024.900	66.847.373	25.822.473
Pekerjaan Umum	2.365.415.844	2.260.556.014	(104.859.830)
Dinas Bina Marga	2.140.511.326	2.012.193.437	(128.317.889)
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	148.414.118	181.680.349	33.266.231
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	76.490.400	66.682.228	(9.808.172)

G ✓

URUSAN/SKPD	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	6
Perencanaan Pembangunan	24.193.952	22.520.576	(1.673.376)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	24.193.952	22.520.576	(1.673.376)
Perhubungan	88.316.000	97.496.438	9.180.438
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	88.316.000	97.496.438	9.180.438
Lingkungan Hidup	32.401.775	31.387.180	(1.104.595)
Badan Lingkungan Hidup	32.401.775	31.387.180	(1.104.595)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.638.012	14.435.870	797.858
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	13.638.012	14.435.870	797.858
Sosial	163.595.399	163.349.551	(245.848)
Dinas Sosial	138.557.399	136.137.871	(2.419.528)
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.038.000	27.211.680	2.173.680
Tenaga Kerja	64.599.981	62.651.129	(1.948.852)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	64.599.981	62.651.129	(1.948.852)
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	35.932.000	39.484.286	3.552.286
Dinas Koperasi dan UMKM	35.932.000	39.484.286	3.552.286

URUSAN/SKPD	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	6
Penanaman Modal	15.329.229	14.416.830	(912.399)
Badan Penanaman Modal Daerah	15.329.229	14.416.830	(912.399)
Kebudayaan	70.416.360	52.833.515	(17.582.845)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	70.416.360	52.833.515	(17.582.845)
Kepemudaan dan Olah Raga	38.866.100	43.851.370	4.985.270
Dinas Pemuda dan Olah Raga	38.866.100	43.851.370	4.985.270
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	53.821.500	52.879.904	(941.596)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	40.298.500	40.504.167	205.667
Satuan Polisi Pamong Praja	13.523.000	12.375.737	(1.147.263)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	706.738.981	660.147.086	(46.591.895)
DPRD			
KDH & WKDH			
Sekretariat Daerah	193.252.730	185.108.663	(8.144.067)
Sekretariat DPRD	105.905.992	92.953.123	(12.952.869)
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	222.655.498	203.586.715	(19.068.783)
Badan Penelitian dan Pengembangan	15.491.398	16.786.189	1.294.791
Inspektorat	29.045.238	27.085.943	(1.959.295)

8 ✓

URUSAN/SKPD	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	6
Kantor Perwakilan	15.586.719	16.567.130	980.411
Badan Pendidikan dan Pelatihan	67.996.340	65.935.423	(2.060.917)
Badan Kepegawaian Daerah	34.416.185	30.098.477	(4.317.708)
Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I	7.115.876	7.072.356	(43.520)
Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II	8.440.638	8.537.848	97.210
Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah III	6.832.367	6.415.219	(417.148)
Ketahanan Pangan	19.238.960	19.672.252	433.292
Badan Ketahanan Pangan	19.238.960	19.672.252	433.292
Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.364.500	26.427.679	(1.936.821)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.364.500	26.427.679	(1.936.821)
Kearsipan	23.190.767	21.786.336	(1.404.431)
Badan Arsip dan Perpustakaan	23.190.767	21.786.336	(1.404.431)
Komunikasi dan Informatika	7.574.278	6.859.316	(714.962)
Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	7.574.278	6.859.316	(714.962)
URUSAN PILIHAN			
Pertanian	191.286.973	219.242.896	27.255.923
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	60.814.300	59.436.306	(1.377.994)
Dinas Perkebunan	68.169.581	84.911.305	16.741.724
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.076.092	53.856.488	6.780.396
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	15.227.000	21.038.797	5.811.797

9 ✓

URUSAN/SKPD	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	6
Kehutanan	23.566.085	26.574.861	3.008.776
Dinas Kehutanan	23.566.085	26.574.861	3.008.776
Energi dan Sumberdaya Mineral	54.916.016	66.235.168	11.319.152
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	54.916.016	66.235.168	11.319.152
Kelautan dan Perikanan	50.557.355	58.542.032	7.984.677
Dinas Kelautan dan Perikanan	50.557.355	58.542.032	7.984.677
Industri	75.000.000	81.203.826	6.203.826
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000	81.203.826	6.203.826

3.2 Alokasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2015 per Prioritas Pembangunan Daerah Mendasarkan Belanja Langsung

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2015 per Prioritas Pembangunan Daerah
Mendasarkan Belanja Langsung

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Dalam Ribuan Rupiah			
		Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
1.	Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program	228.505.181	6,07	281.923.655	7,56
	pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi				
	Kewilayahan				
	a. Program Fasilitas Pengembangan Masyarakat dan Desa	7.600.000	0,20	5.289.918	0,14
	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.325.000	0,11	5.004.380	0,13
	c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.329.388	0,27	11.663.919	0,31
	d. Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	7.580.000	0,20	6.824.118	0,18
	e. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	970.000	0,02	950.000	0,03
	f. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	3.700.000	0,10	3.210.445	0,09
	g. Program Pendidikan Non Formal dan Informal	51.230.467	1,36	49.729.542	1,33
	h. Program Pendidikan Dasar	25.057.708	0,67	23.525.669	0,63
	i. Program Pendidikan Menengah	37.964.368	1,01	44.087.490	1,18
	j. Program Promosi dan Pemberdayaan	49.709.000	1,32	44.039.420	1,18
	k. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.500.000	0,04	1.430.670	0,04

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya	8.562.000	0,23	8.552.400	0,23
	m. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	2.700.000	0,07	3.096.600	0,08
	n. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8.640.000	0,23	65.658.860	1,76
	o. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.400.000	0,04	1.288.888	0,03
	p. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2.100.000	0,06	2.016.567	0,05
	q. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	4.095.000	0,11	3.957.769	0,11
	r. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1.042.250	0,03	1.597.000	0,04
2.	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah	2.396.535.635	63,68	2.296.685.371	61,55
	a. Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan	1.585.133.834	42,12	1.505.903.986	40,36
	b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	502.799.050	13,36	437.646.700	11,73
	c. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	42.423.894	1,13	54.273.437	1,45
	d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	64.188.959	1,71	82.434.421	2,21
	e. Program penyediaan dan pengelolaan air baku	9.558.000	0,25	22.026.321	0,59
	f. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	35.985.918	0,96	42.633.935	1,14
	g. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	26.173.015	0,70	21.690.523	0,58
	h. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	14.350.000	0,38	10.524.433	0,28

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	i. Program Pembangunan Perumahan	13.544.000	0,36	13.288.197	0,36
	j. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	19.998.500	0,53	19.769.093	0,53
	k. Program Peningkatan Sarpras Perkotaan dan Perdesaan	12.132.400	0,32	10.819.200	0,29
	l. Program Perhubungan Darat	43.920.000	1,17	54.756.786	1,47
	m. Program Perhubungan Laut	9.550.000	0,25	6.540.645	0,18
	n. Program Perhubungan Udara	660.000	0,01	397.395	0,01
	o. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	11.438.065	0,30	10.014.912	0,27
	p. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	4.680.000	0,12	3.965.387	0,11
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas	475.494.371	12,63	545.895.556	14,63
	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.483.200	0,12	4.359.700	0,12
	b. Program Pendidikan Khusus	8.740.000	0,23	8.740.000	0,23
	c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.837.240	0,93	31.339.385	0,84
	d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	20.770.737	0,55	18.282.593	0,49
	e. Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi	3.722.500	0,10	5.170.600	0,14
	f. Program Pendidikan Berkelanjutan	5.550.000	0,15	5.582.600	0,15
	g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.695.000	0,10	3.509.400	0,09
	h. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	3.900.000	0,10	6.233.030	0,17
	i. Program Pelayanan Kesehatan	264.200.632	7,02	335.856.931	9,00
	j. Program Kesehatan Lingkungan	1.270.000	0,03	2.102.600	0,06

R ✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	k. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.740.000	0,26	8.494.708	0,23
	l. Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	6.100.000	0,16	5.056.257	0,14
	m. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	6.740.000	0,18	6.595.813	0,18
	n. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.971.902	0,19	6.846.199	0,18
	o. Program Pelayanan Keluarga Berencana	3.325.000	0,09	3.976.015	0,11
	p. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	255.000	0,007	253.650	0,01
	q. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	225.000	0,006	218.970	0,01
	r. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri	100.000	0,003	95.985	0,003
	s. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balit	725.000	0,01	708.935	0,02
	t. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	15.082.500	0,40	14.989.294	0,40
	u. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.100.000	0,27	9.794.310	0,26
	v. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	8.803.725	0,23	9.293.173	0,25
	w. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	6.478.500	0,17	5.847.765	0,16
	x. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	1.390.000	0,04	1.307.915	0,04
	y. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga	1.233.500	0,03	1.164.675	0,03

Q

✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	z. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	3.900.000	0,10	3.663.269	0,10
	aa. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	22.185.000	0,59	22.989.607	0,62
	bb. Program Pengembangan Budaya Baca	1.546.250	0,04	1.447.600	0,04
	cc. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	4.020.570	0,10	3.828.440	0,10
	dd. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	927.951	0,02	827.521	0,02
	ee. Program Peningkatan SDM Perpustakaan	348.129	0,009	336.010	0,01
	ff. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	11.841.285	0,31	12.054.290	0,32
	gg. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	435.750	0,01	433.500	0,01
	hh. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	1.850.000	0,05	4.562.996	0,12
4.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	243.706.050	6,48	226.225.265	6,06
	a. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	3.650.000	0,10	3.583.902	0,10
	b. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	17.705.000	0,47	20.823.810	0,56
	c. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	1.450.000	0,04	1.428.826	0,04

8 ✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	d. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	2.895.000	0,08	2.886.864	0,08
	e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.425.000	0,06	2.245.020	0,06
	f. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	598.000	0,01	508.250	0,01
	g. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	6.500.000	0,17	7.323.200	0,20
	h. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil	5.097.200	0,14	5.343.575	0,14
	i. Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	7.625.000	0,20	6.898.985	0,18
	j. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	3.500.000	0,09	3.382.190	0,09
	k. Program Pemasaran Pariwisata	6.954.000	0,18	7.068.010	0,19
	l. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.770.800	0,15	5.582.705	0,15
	m. Program Pengembangan Kemitraan	2.400.200	0,06	2.241.460	0,06
	n. Program Pengembangan Agribisnis	103.758.000	2,76	61.398.006	1,65
	o. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	8.750.000	0,23	15.178.125	0,41
	p. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.732.500	0,05	1.692.000	0,05
	q. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	2.782.500	0,07	3.498.775	0,09
	r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	11.225.000	0,30	10.873.674	0,29
	s. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	7.865.000	0,21	13.472.408	0,36
	t. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	5.640.700	0,15	9.059.781	0,24

✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	u. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	9.347.500	0,25	9.008.993	0,24
	v. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	12.065.000	0,32	19.510.875	0,52
	w. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	2.219.650	0,06	1.792.910	0,05
	x. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM	3.075.000	0,08	2.746.535	0,07
	y. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	5.800.000	0,15	6.142.726	0,16
	z. Program Pengembanagan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Industri	2.875.000	0,08	2.533.660	0,07
5.	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian Fungsinya	82.904.360	2,20	86,522,780	2,32
	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	14.077.580	0,37	12.513.875	0,34
	b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	10.100.000	0,27	10.214.020	0,27
	c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.450.000	0,12	9.817.786	0,26
	d. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	2.981.000	0,08	3.139.632	0,08
	e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA	570.195	0,01	434.695	0,01
	f. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.000.000	0,05	1.137.390	0,03

✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	g. Program Perencanaan Tata Ruang	4.215.500	0,11	2.935.978	0,08
	h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.967.735	0,08	3.886.910	0,10
	j. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1.593.750	0,04	1.745.853	0,05
	k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3.275.000	0,09	416.645	0,01
	l. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	735.000	0,02	677.387	0,02
	m. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	11.105.000	0,30	11.843.780	0,32
	n. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.050.000	0,03	882.250	0,02
	o. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.161.100	0,06	2.602.130	0,07
	p. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	3.622.500	0,10	3.469.950	0,09
	q. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	11.490.000	0,31	15.855.204	0,42
	r. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	2.210.000	0,06	985.000	0,03
	s. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4.300.000	0,11	3.964.295	0,11
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah	336.364.100	8,94	294.028.298	7,88
	a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	655.000	0,01	652.000	0,02
	b. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.420.000	0,04	1.424.006	0,04

2

✓

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	c. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.710.000	0,05	1.707.879	0,05
	d. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	5.130.000	0,14	5.542.000	0,15
	e. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	69.641.251	1,85	55.870.481	1,50
	f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	50.214.175	1,33	37.875.992	1,02
	g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	42.517.980	1,13	34.850.210	0,93
	h. Program Pengelolaan Aset Daerah	6.682.981	0,18	7.482.817	0,20
	i. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	17.689.857	0,47	14.839.489	0,40
	j. Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.300.000	0,06	2.984.080	0,08
	k. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.615.645	0,04	1.217.672	0,03
	l. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	500.000	0,01	450.000	0,01
	m. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.155.000	0,11	3.828.601	0,10
	n. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	213.720	0,006	202.255	0,01
	o. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000	0,005	234.400	0,01
	p. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.306.000	0,03	1.251.900	0,03
	q. Program Perencanaan Pembangunan Sosbud	3.017.300	0,08	2.944.440	0,08

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	r. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	3.325.300	0,09	3.063.725	0,08
	s. Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	1.185.000	0,03	1.038.260	0,03
	t. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.301.000	0,35	11.685.105	0,31
	u. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.092.000	0,14	4.902.275	0,13
	v. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.663.000	0,04	1.929.525	0,05
	w. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	4.770.000	0,13	4.717.020	0,13
	x. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	6.300.000	0,17	6.760.000	0,18
	y. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	10.105.000	0,27	9.699.740	0,26
	z. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.750.000	0,15	6.855.000	0,18
	aa. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.930.000	0,05	1.467.465	0,04
	bb. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	3.150.000	0,08	5.288.190	0,14
	cc. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	341.100	0,009	369.900	0,01
	dd. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	54.679.273	1,45	46.670.719	1,25
	ee. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.442.000	0,04	1.118.000	0,03
	ff. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.750.880	0,05	1.466.972	0,04

No	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Sebelum Perubahan		Pagu Indikator Setelah Perubahan	
		Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)	Anggaran (Rp.)	% (Thd Total BL - Eks BAU - BLUD)
	gg. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	410.000	0,01	400.000	0,01
	hh. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	125.000	0,003	125.000	0,003
	ii. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	8.482.500	0,23	9.787.768	0,26
	jj. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1.903.138	0,10	1.760.762	0,05
	kk. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	1.690.000	0,04	1.564.650	0,04

2 ✓

BAB IV

PENUTUP

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Perubahan RKPD Tahun 2015 merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Jawa Tengah.

Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2015 membutuhkan komitmen seluruh SKPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga sinkronisasi dan sinergitas dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari-*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO